

Pemanfaatan ChatGPT dalam Konsultasi Hukum Keluarga: Kajian Akurasi dan Aspek Etis

Harun Harasyid¹, Khalilah Ramadhani^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: harasyidh@gmail.com, ramadhani.khalilah22@gmail.com

Article History	Abstract
Received : 23 Desember 2024 Revised : 02 Maret 2025 Accepted : 10 April 2025	<p><i>The development of artificial intelligence (AI) has encouraged the use of ChatGPT as a means of information consultation in various fields, including family law. Ease of access, speed of response, and the ability to present information in easy-to-understand language have made ChatGPT increasingly used by the public to obtain initial information regarding marriage, divorce, child custody, alimony, and inheritance. This study aims to analyze the level of accuracy of family law information generated by ChatGPT and examine the ethical aspects that arise from its use as a legal consultation medium. The study used a qualitative method with a normative juridical approach and literature review. Data were obtained from laws and regulations, legal literature, scientific journals, documents related to artificial intelligence, and the results of testing ChatGPT's responses to various family law questions. Data were analyzed using content analysis techniques. The results show that ChatGPT has a fairly good level of accuracy in answering general family law questions, but still has limitations in complex cases and has the potential to produce inaccurate information. Furthermore, the use of ChatGPT raises various ethical issues, such as personal data protection, information confidentiality, accountability, and potential algorithmic bias. Therefore, ChatGPT can be used as a means of education and initial legal consultation, but cannot replace the role of legal professionals in providing comprehensive legal advice and assistance.</i></p> <p>Keywords: ChatGPT, Artificial Intelligence, Family Law Consulting, Information Accuracy, AI Ethics</p>

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah mendorong pemanfaatan ChatGPT sebagai sarana konsultasi informasi di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga. Kemudahan akses, kecepatan respons, dan kemampuan menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami menjadikan ChatGPT semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi awal mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akurasi informasi hukum keluarga yang dihasilkan ChatGPT serta mengkaji aspek etis yang muncul dalam penggunaannya sebagai media konsultasi hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen terkait kecerdasan buatan, serta hasil pengujian respons ChatGPT terhadap berbagai pertanyaan hukum keluarga. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan hukum keluarga yang bersifat umum, namun masih memiliki keterbatasan pada kasus yang kompleks dan berpotensi menghasilkan informasi yang

tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, penggunaan ChatGPT menimbulkan berbagai persoalan etis, seperti perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritma. Oleh karena itu, ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan konsultasi hukum awal, tetapi tidak dapat menggantikan peran profesional hukum dalam memberikan nasihat dan pendampingan hukum yang komprehensif.

Kata Kunci : ChatGPT, Kecerdasan Buatan, Konsultasi Hukum Keluarga, Akurasi Informasi, Etika AI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Salah satu inovasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah ChatGPT, sebuah sistem *generative artificial intelligence* yang mampu menghasilkan respons berbasis bahasa alami terhadap berbagai pertanyaan pengguna. Kehadiran ChatGPT memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat, termasuk informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, waris, dan penyelesaian sengketa keluarga (Russell, 2021). Dalam konteks masyarakat digital, teknologi ini mulai dipandang sebagai alternatif sumber konsultasi awal sebelum seseorang mencari bantuan dari advokat, konsultan hukum, atau lembaga bantuan hukum.

Secara teoritis, pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum sejalan dengan konsep *legal technology* yang menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan pelayanan hukum yang lebih efisien (Susskind, 2017). Kehadiran ChatGPT memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan hukum secara instan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, teknologi ini dapat membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat karena mampu menyajikan informasi hukum dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), pemanfaatan AI berpotensi memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat yang selama ini mengalami hambatan biaya, jarak, maupun keterbatasan akses terhadap profesional hukum (Rhode, 2004).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan AI generatif semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak masyarakat mulai memanfaatkan ChatGPT untuk mencari informasi hukum terkait prosedur perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta bersama, hak asuh anak, hingga penyelesaian sengketa waris. Kemudahan akses, kecepatan respons, dan kemampuan menjelaskan berbagai persoalan hukum menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan ChatGPT sebagai sarana konsultasi hukum awal (Dwivedi, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi hukum yang sebelumnya lebih bergantung pada sumber konvensional.

Meskipun demikian, penggunaan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga juga

menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu fenomena yang sering ditemukan adalah kecenderungan pengguna untuk menerima jawaban AI sebagai informasi hukum yang sepenuhnya benar tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Padahal, ChatGPT memiliki keterbatasan dalam memahami konteks hukum yang spesifik, perubahan regulasi, serta kondisi faktual yang kompleks dalam setiap kasus hukum (OpenAI, 2023). Akibatnya, terdapat risiko munculnya informasi yang kurang akurat atau bahkan menyesatkan apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

Selain persoalan akurasi, aspek etis juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan ChatGPT untuk konsultasi hukum keluarga. Permasalahan seperti kerahasiaan data pengguna, perlindungan privasi, bias algoritma, akuntabilitas atas informasi yang diberikan, dan potensi penyalahgunaan teknologi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius (Floridi, 2019). Dalam hukum keluarga, persoalan yang dikonsultasikan sering kali menyangkut informasi pribadi yang sensitif, sehingga penggunaan teknologi AI harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan perlindungan data yang memadai.

Tantangan lain yang muncul adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI generatif sebagai sarana konsultasi hukum di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab penyedia teknologi, validitas informasi yang diberikan AI, serta posisi ChatGPT dalam sistem layanan hukum yang ada. Di satu sisi, teknologi ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan risiko apabila digunakan sebagai pengganti nasihat hukum profesional tanpa pengawasan yang memadai.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penggunaan AI dalam bidang hukum. Surden (2019) menjelaskan bahwa AI memiliki potensi besar dalam membantu analisis hukum, pencarian dokumen, dan pengelolaan informasi hukum, tetapi tetap memiliki keterbatasan dalam penalaran hukum yang kompleks. Penelitian McGinnis dan Pearce (2014) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi profesi hukum, meskipun masih memerlukan pengawasan manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum. Sementara itu, penelitian Zhang dan Dafoe (2023) menyoroti berbagai risiko etis penggunaan AI generatif, termasuk potensi bias, ketidakakuratan informasi, dan masalah akuntabilitas.

Meskipun penelitian mengenai AI dan hukum telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada penggunaan AI dalam sistem peradilan, analisis dokumen hukum, atau profesi hukum secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji pemanfaatan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga, terutama dari perspektif akurasi informasi dan aspek etis, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena secara khusus menempatkan ChatGPT sebagai objek kajian dalam konteks hukum keluarga yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bidang hukum lainnya.

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan dua aspek penting sekaligus, yaitu tingkat akurasi informasi hukum keluarga yang dihasilkan oleh ChatGPT dan implikasi etis penggunaannya dalam praktik konsultasi hukum. Kajian ini tidak hanya menilai kemampuan teknologi dalam memberikan informasi hukum, tetapi juga mengevaluasi risiko dan tanggung jawab yang muncul dari penggunaan AI dalam persoalan keluarga yang bersifat sensitif dan personal.

Penelitian ini penting dilakukan karena penggunaan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Kajian mengenai akurasi dan aspek etis menjadi relevan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi AI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum, etika, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan tata kelola penggunaan AI dalam layanan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pemanfaatan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga, khususnya terkait tingkat akurasi informasi hukum dan aspek etis penggunaannya. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum, prinsip etika, serta regulasi yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan informasi hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pedoman etika kecerdasan buatan, serta hasil respons ChatGPT terhadap berbagai kasus hukum keluarga yang dijadikan objek kajian. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas kecerdasan buatan, teknologi hukum (*legal technology*), serta hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Selain itu, peneliti melakukan pengujian terhadap beberapa pertanyaan hukum keluarga yang diajukan kepada ChatGPT untuk menilai tingkat kesesuaian jawaban dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teknik ini dipilih karena memungkinkan evaluasi langsung terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem AI.

Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, komparasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi tingkat akurasi jawaban ChatGPT serta menganalisis berbagai persoalan etis yang muncul dalam praktik konsultasi hukum keluarga berbasis kecerdasan buatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah mendorong lahirnya berbagai penelitian mengenai pemanfaatannya dalam bidang hukum. Surden (2019) menjelaskan bahwa AI memiliki potensi besar untuk membantu pencarian informasi hukum, analisis dokumen, dan prediksi putusan hukum. Namun, AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks sosial, moral, dan kompleksitas penalaran hukum yang sering ditemukan dalam praktik hukum sehari-hari (Surden, 2019).

McGinnis dan Pearce (2014) menyatakan bahwa perkembangan teknologi AI akan mengubah cara layanan hukum diberikan kepada masyarakat. Menurut mereka, teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas akses terhadap informasi hukum, tetapi tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran profesional hukum karena adanya unsur pertimbangan etik dan interpretasi hukum yang memerlukan penilaian manusia (McGinnis & Pearce, 2014). Penelitian Dwivedi et al. (2023) mengenai ChatGPT menunjukkan bahwa teknologi AI generatif memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghasilkan teks dan menjawab pertanyaan pengguna secara cepat. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan risiko berupa informasi yang tidak akurat (*hallucination*), bias algoritma, serta kurangnya transparansi dalam proses pembentukan jawaban (Dwivedi et al., 2023). Sementara itu,

Floridi dan Cowls (2019) mengemukakan bahwa penggunaan AI harus memperhatikan prinsip etika yang meliputi transparansi, keadilan, akuntabilitas, non-maleficence (tidak merugikan), dan penghormatan terhadap otonomi manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting ketika AI digunakan dalam bidang yang sensitif, termasuk layanan hukum dan konsultasi keluarga (Floridi & Cowls, 2019). Meskipun berbagai penelitian telah membahas AI dalam bidang hukum, kajian yang secara khusus meneliti penggunaan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis tingkat akurasi informasi hukum keluarga yang diberikan ChatGPT sekaligus mengkaji implikasi etis penggunaannya dalam konteks konsultasi hukum.

Pemanfaatan ChatGPT dalam Konsultasi Hukum Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT semakin banyak digunakan sebagai sarana konsultasi awal dalam berbagai persoalan hukum keluarga. Pengguna umumnya memanfaatkan ChatGPT untuk memperoleh informasi mengenai prosedur perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, hingga persoalan waris. Daya tarik utama ChatGPT terletak pada kemampuannya memberikan jawaban secara cepat, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja tanpa biaya yang besar. Dalam beberapa kasus, pengguna merasa lebih nyaman mengajukan pertanyaan kepada sistem AI dibandingkan kepada konsultan hukum karena alasan privasi dan kenyamanan psikologis.

Temuan ini menunjukkan bahwa ChatGPT berpotensi menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum (*access to justice*). Masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap advokat atau konsultan hukum kini dapat memperoleh informasi awal dengan lebih mudah melalui teknologi AI. Namun demikian, penggunaan ChatGPT sebagai sarana konsultasi hukum tidak dapat disamakan dengan konsultasi yang dilakukan oleh profesional hukum. Jawaban yang diberikan AI pada dasarnya merupakan hasil pemrosesan data dan pola bahasa, bukan hasil analisis hukum yang mempertimbangkan seluruh aspek faktual dan yuridis dari suatu kasus.

Kajian Akurasi Informasi Hukum Keluarga yang Dihasilkan ChatGPT

Akurasi pada Pertanyaan Hukum yang Bersifat Umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki tingkat akurasi yang relatif tinggi dalam menjawab pertanyaan hukum keluarga yang bersifat umum. Misalnya, pertanyaan mengenai pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, alasan perceraian, kewajiban nafkah, maupun konsep hak asuh anak dapat dijawab dengan cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kemampuan tersebut disebabkan oleh banyaknya referensi hukum yang tersedia dalam data pelatihan AI sehingga ChatGPT mampu menyusun jawaban yang sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, bahasa yang digunakan cenderung lebih sederhana dibandingkan bahasa hukum formal sehingga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum. Dalam konteks literasi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki potensi sebagai sarana edukasi hukum yang efektif bagi masyarakat umum.

Keterbatasan Akurasi pada Kasus yang Kompleks

Meskipun cukup akurat dalam menjawab pertanyaan umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi ChatGPT menurun ketika dihadapkan pada kasus hukum keluarga yang kompleks dan membutuhkan analisis kontekstual. Misalnya, dalam persoalan pembagian harta bersama yang melibatkan perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, atau sengketa hak asuh anak yang melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga, ChatGPT sering memberikan jawaban yang bersifat umum dan tidak mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Surden (2019) yang menyatakan bahwa AI belum mampu melakukan penalaran hukum secara mendalam sebagaimana dilakukan oleh praktisi hukum. AI dapat mengidentifikasi pola dan memberikan informasi umum, tetapi belum mampu memahami nuansa sosial, psikologis, dan yuridis yang melekat dalam setiap kasus hukum.

Risiko Hallucination dan Informasi yang Tidak Akurat

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya risiko *hallucination*,

yaitu kondisi ketika ChatGPT menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya tidak akurat atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam beberapa simulasi pertanyaan, ditemukan bahwa ChatGPT terkadang menyebutkan dasar hukum yang tidak tepat atau memberikan interpretasi yang terlalu luas terhadap suatu ketentuan hukum. Risiko ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum keluarga karena kesalahan informasi dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian OpenAI (2023) yang menyatakan bahwa model AI generatif masih memiliki kemungkinan menghasilkan jawaban yang keliru meskipun disampaikan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh ChatGPT sebaiknya diposisikan sebagai informasi awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui sumber hukum resmi atau konsultasi dengan profesional hukum.

Aspek Etis dalam Pemanfaatan ChatGPT untuk Konsultasi Hukum Keluarga

Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pribadi

Persoalan etis pertama yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan kerahasiaan data pengguna. Konsultasi hukum keluarga umumnya melibatkan informasi yang bersifat pribadi dan sensitif, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hak asuh anak, dan persoalan ekonomi keluarga. Ketika informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem AI, muncul pertanyaan mengenai keamanan data dan kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak lain. Dalam perspektif etika hukum, kerahasiaan merupakan prinsip penting yang harus dijaga dalam setiap proses konsultasi hukum. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bahwa penggunaan ChatGPT tidak sepenuhnya setara dengan hubungan profesional antara advokat dan klien yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan profesi.

Masalah Akuntabilitas

Tantangan etis berikutnya adalah persoalan akuntabilitas. Jika seorang pengguna mengalami kerugian akibat mengikuti informasi yang diberikan ChatGPT, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Berbeda dengan advokat yang memiliki tanggung jawab profesional dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan, ChatGPT tidak memiliki tanggung jawab hukum secara langsung terhadap pengguna. Situasi ini menciptakan kekosongan akuntabilitas yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan regulasi AI. Menurut Floridi dan Cowls (2019), setiap sistem AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan penting harus memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak merugikan masyarakat.

Potensi Bias Algoritma

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ChatGPT berpotensi menghasilkan

jawaban yang dipengaruhi oleh bias data. Bias dapat muncul karena data pelatihan yang digunakan tidak selalu mencerminkan keberagaman perspektif hukum, budaya, maupun sosial. Dalam konteks hukum keluarga, bias dapat memengaruhi cara AI menjelaskan peran suami, istri, hak asuh anak, maupun persoalan gender. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, bias tersebut berpotensi menghasilkan informasi yang tidak adil atau kurang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

Pengurangan Peran Profesional Hukum

Kemudahan akses terhadap ChatGPT juga menimbulkan kekhawatiran mengenai berkurangnya peran profesional hukum dalam memberikan konsultasi kepada masyarakat. Sebagian pengguna mungkin merasa cukup dengan jawaban AI dan tidak lagi berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum. Padahal, banyak persoalan hukum keluarga memerlukan analisis yang mendalam, pendampingan psikologis, serta strategi penyelesaian sengketa yang tidak dapat diberikan oleh AI. Oleh karena itu, ChatGPT seharusnya diposisikan sebagai alat bantu (*supporting tool*) dan bukan sebagai pengganti profesional hukum.

Strategi Pemanfaatan ChatGPT yang Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan agar pemanfaatan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga berlangsung secara bertanggung jawab. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan literasi hukum agar mampu mengevaluasi informasi yang diperoleh dari AI secara kritis. Kedua, informasi yang diberikan ChatGPT harus diverifikasi melalui sumber hukum resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau pendapat ahli hukum yang kompeten. Ketiga, penggunaan ChatGPT untuk kasus hukum keluarga yang kompleks sebaiknya tetap disertai konsultasi dengan advokat atau konsultan hukum profesional. Keempat, pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam layanan hukum guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum keluarga. Kemampuan memberikan jawaban secara cepat, mudah dipahami, dan tersedia sepanjang waktu menjadikan teknologi ini sebagai sarana edukasi hukum yang efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat akurasi ChatGPT masih bergantung pada kompleksitas pertanyaan yang diajukan. Pada kasus yang sederhana dan bersifat umum, jawaban yang diberikan relatif akurat. Sebaliknya, pada kasus yang kompleks, terdapat risiko kesalahan informasi dan penyederhanaan persoalan hukum yang berlebihan.

Dari perspektif etika, penggunaan ChatGPT menimbulkan berbagai tantangan

terkait kerahasiaan data, akuntabilitas, bias algoritma, dan posisi AI dalam sistem layanan hukum. Oleh karena itu, pemanfaatan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menggantikan peran profesional hukum. Dengan demikian, ChatGPT dapat berfungsi sebagai sarana konsultasi awal dan edukasi hukum bagi masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Penggunaan teknologi ini harus disertai verifikasi informasi, penguatan regulasi, dan pengawasan etis agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga memberikan peluang yang signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Kemampuan ChatGPT untuk memberikan respons secara cepat, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja menjadikannya sarana alternatif yang efektif dalam memperoleh informasi awal mengenai berbagai persoalan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris. Kehadiran teknologi ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat serta mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum profesional.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi ChatGPT masih memiliki keterbatasan, terutama dalam menangani kasus hukum keluarga yang kompleks dan membutuhkan analisis kontekstual. Meskipun relatif akurat dalam menjawab pertanyaan yang bersifat umum, ChatGPT berpotensi menghasilkan informasi yang tidak tepat (*hallucination*), kurang memperhatikan kondisi faktual setiap kasus, serta belum mampu menggantikan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh melalui ChatGPT perlu diverifikasi dengan sumber hukum yang resmi dan tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Dari aspek etis, penelitian ini menemukan beberapa tantangan penting, yaitu perlindungan data pribadi pengguna, kerahasiaan informasi keluarga, akuntabilitas atas jawaban yang diberikan AI, serta potensi bias algoritma. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam konsultasi hukum keluarga harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, ChatGPT dapat berfungsi sebagai alat bantu konsultasi hukum awal dan media edukasi hukum bagi masyarakat, tetapi tidak dapat menggantikan peran advokat, konsultan hukum, maupun lembaga bantuan hukum. Optimalisasi manfaat ChatGPT memerlukan peningkatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat, verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan AI, serta dukungan regulasi yang mampu

mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab dalam layanan hukum. Melalui pendekatan tersebut, pemanfaatan ChatGPT diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar tanpa mengabaikan aspek akurasi, etika, dan perlindungan hak-hak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., et al. (2023). So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642.
- European Commission. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. European Commission.
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2024). Maqāsid al-Syarī'ah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88-101. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/114>
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2024). Keluarga Sakinah di Era Media Sosial: Tantangan dan Strategi Hukum Preventif. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1-10. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/120>
- McGinnis, J. O., & Pearce, R. G. (2014). The great disruption: How machine intelligence will transform the role of lawyers in the delivery of legal services. *Fordham Law Review*, 82(6), 3041–3066.
- OpenAI. (2023). *GPT-4 technical report*. OpenAI.
- Rhode, D. L. (2004). *Access to justice*. Oxford University Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. *Georgia State University Law Review*, 35(4), 1305–1334.
- Susskind, R. (2017). *Tomorrow's lawyers: An introduction to your future* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Zhang, B., & Dafoe, A. (2023). *Artificial intelligence: American attitudes and trends*. Centre for the Governance of AI.